REPOSITORY UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan otonomi daerah telah membawa tuntutan dan perubahan terhadap sistim nilai dan budaya kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan otonomi daerah menuntut nilai dasar yang senantiasa dapat mengakomodasikan kebutuhan yang berorientasi kepada aspirasi masyarakat dengan prinsip-prinsip demokratisasi, peran serta, pemerataan dan berkeadilan. Kondisi tersebut menuntut adanya kerangka pikir yang terstruktur untuk dapat memberdayakan fungsi publik agar lebih sesuai dengan tuntutan perkembangan ekonomi, politik, sosial dan budaya. Untuk itu diperlukan peningkatan budaya dan etos kerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil serta pertanggungjawaban berdasarkan nilai-nilai akuntabilitas menuju *good governance* yakni untuk mencapai kinerja aparat yang sesuai dengan harapan.

Kinerja atau unjuk kerja merupakan hasil kerja yang dihasilkan oleh aparatur atau perilaku nyata yang ditampilkan sesuai dengan perannya dalam organisasi. Unjuk kerja aparatur merupakan suatu hal yang sangat penting dalam usaha organisasi untuk mencapai tujuannya, sehingga berbagai kegiatan harus dilakukan Aparatur sipil negara untuk meningkatkannya. Pengukuran kinerja Aparatur sipil negara ini sangat penting bagi organisasi yang berorientasikan pada ukuran kinerjanya sendiri dan melihat tingkat kinerja yang telah dicapai atau output yang diperoleh.

repository.unsimar.ac.id

REPOSITORY UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO

Kinerja secara umum dapat dipahami sebagai besarnya kontribusi yang diberikan Aparatur sipil negara terhadap kemajuan dan perkembangan di lembaga tempat dia bekerja. Dengan demikian diperlukan kinerja yang lebih intensif dan optimal dari bagian organisasi demi optimalisasi bidang tugas yang di embannya. Kinerja aparat dalam suatu organisasi sangat penting, oleh karena dengan adanya kinerja maka tingkat pencapaian hasil akan terlihat sehingga akan dapat diketahui seberapa jauh pula tugas yang telah dipikul melalui tugas dan wewenang yang diberikan dapat dilaksanakan secara nyata dan maksimal. Kinerja Aparatur sipil negara yang telah dilaksanakan dengan tingkat pencapaian tertentu tersebut seharusnya sesuai dengan misi yang telah ditetapkan sebagai landasan untuk melakukan tugas yang diemban. Dengan demikian kinerja (performance) merupakan tingkat pencapaian hasil atau *the degrees of accomplishment*.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999, tentang Pokok-Pokok Keaparatur sipil negaraan, bahwa dalam rangka mencapai tujuan nasional untuk mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern, demokratis, makmur, adil, dan bermoral tinggi, diperlukan Aparatur sipil negara yang merupakan unsur aparatur negara yang bertugas sebagai abdi masyarakat yang menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan penuh kesetian kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Terlebih dengan diterapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang berintikan penyelenggaraan otonomi daerah

repository.unsimar.ac.id

REPOSITORY UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO

dengan pengertian bahwa otonomi daerah ialah kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Salah satu aspek yang sangat penting dalam upaya pembangunan nasional adalah sumber daya manusia yang umumnya diakui bahwa keberhasilan dari setiap organisasi berkaitan dengan kualitas sumber daya manusianya, maka dalam usaha meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam hal ini Aparatur sipil negara negeri sipil dalam menjalankan tugas dan fungsinya perlu mendapatkan perhatian serius dari pimpinan, salah satu langkah yang ditempuh adalah dengan cara melakukan pembinaan aparat untuk meningkatkan kinerja Aparatur sipil negara.

Kedudukan dan peranan Aparatur sipil negara sebagai unsur aparatur negara yang bertugas sebagai abdi masyarakat harus menyelenggarakan pelayanan secara adil kepada masyarakat dengan dilandasi kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk dapat melaksanakan tugas tersebut, maka pembinaan Aparatur sipil negara dalam rangka meningkatkan kinerja diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar memiliki sikap dan perilaku yang berintikan pengabdian, kejujuran, tanggung jawab, disiplin serta wibawa sehingga dapat memberikan pelayanan sesuai tuntutan perkembangan masyarakat.

Sebagaimana terlihat, bahwa kedudukan dan peranan Aparatur sipil negara adalah penting dan sangat menentukan, karena Aparatur sipil negara

repository.unsimar.ac.id

REPOSITORY UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO

negera adalah unsur aparatur negara yang menyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional. Oleh karena itu, setiap Aparatur sipil negara/aparat selalu dituntut untuk melaksanakan tugAparatur sipil negaraya secara berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu diatur pembinaan Aparatur sipil negara dengan sebaik-baiknya atas dasar sistem karier dan sistem prestasi kerja, sehingga dengan demikian dapat dikembangkan bakat dan kemampuan yang ada pada diri masing-masing Aparatur sipil negara negeri sipil secara wajar, sehingga tercipta motivasi kerja para Aparatur sipil negara untuk meningkatkan kinerjanya, khususnya dalam meningkatkan kinerja Aparatur sipil negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti menunjukkan adanya masalah terkait dengan upaya peningkatan kinerja Aparatur sipil Negara dalam menunjang tugas pokok dan fungsi DPRD Kabupaten Tojo Una-Una Apabila dikaitkan dengan teori Robbins yang terdiri dari 3 aspek, yaitu motivasi, kemampuan dan kesempatan, ada beberapa aspek yang tidak terpenuhi. *Pertama, aspek motivasi:* yaitu rendahnya motivasi kerja Aparatur sipil negara. Rendahnya motivasi kerja Aparatur sipil negara menjadi salah satu faktor yang sangat menentukan rendahnya kinerja Aparatur sipil negara, seperti tidak adanya dorongan dan motivasi yang diberikan oleh pimpinan untuk melaksanakan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab masing-masing Aparatur sipil negara. Selain itu, kurangnya kendaraan mobil operasional (kendaraan dinas) yang disediakan oleh pemerintah daerah bagi para Aparatur

repository.unsimar.ac.id

REPOSITORY UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO

sipil negara, serta hanya bisa dengan kendaraan roda dua. Masalah lain adalah, tidak transparannya pembagian insentif kepada para Aparatur sipil negara.

Aspek kemampuan: yaitu kurang disiplinnya Aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawabnya, serta kurangnya kerja sama yang dilakukan oleh para Aparatur sipil negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, kualitas kinerja Aparatur sipil negara belum menunjukkan capaian kerja yang sesuai, yaitu kurang ditaatinya peraturan organisasi, seperti waktu jam kerja yang digunakan Aparatur sipil negara tidak sesuai dengan yang seharusnya, yaitu dalam seminggu rata-rata Aparatur sipil negara hanya memiliki waktu 2-3 hari kerja, selebihnya tidak masuk kantor tanpa alasan yang jelas. Sedangkan penyelesaian suatu pekerjaan oleh Aparatur sipil negara terlihat bahwa ketersediaan waktu yang ada masih belum dapat dimanfaatkan dengan maksimal atau dengan kata lain dapat dikatakan penyelesaiannya tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, sehingga menyebabkan tugas tersebut menjadi terbengkalai.

Dengan mengacuh pada permasalahan di atas, maka calon peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul upaya peningkatan kinerja Aparatur sipil negara dalam menunjang tugas pokok dan fungsi DPRD Kabupaten Tojo Una-Una

repository.unsimar.ac.id

REPOSITORY UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana upaya peningkatan kinerja Aparatur Sipil Negara dalam menunjang tugas pokok dan fungsi DPRD Kabupaten Tojo Una-Una ?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi upaya peningkatan kinerja Aparatur sipil negara dalam menunjang tugas pokok dan fungsi DPRD Kabupaten Tojo Una-Una?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
   a. Untuk mengetahui upaya peningkatan kinerja Aparatur sipil negara dalam menunjang tugas pokok dan fungsi DPRD Kabupaten Tojo Una-Una
   b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi upaya peningkatan kinerja Aparatur sipil negara dalam menunjang tugas pokok dan fungsi DPRD Kabupaten Tojo Una-Una
2. Manfaat Penelitian
   a. Segi Akademik
   Sebagai sumbangan penelitian bagi ilmu pengetahuan administrasi khususnya tentang pelayanan publik
   b. Segi Praktis
      1. Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan masukan bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Tojo Una-Una
      2. Sumber informasi bagi penelitian yang sama terutama tentang Kualitas Pelayanan.

repository.unsimar.ac.id